

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan perekonomian di pedesaan cenderung sulit untuk berkembang dan bisa dibilang lambat dibandingkan dengan daerah perkotaan, adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian desa yang sulit berkembang tersebut seperti Sumber Daya Alam (SDA), tingkat pendidikan, keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal yang tidak berkembang dan kebijakan pemerintah. Sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden salah satu isinya yaitu menjelaskan tentang Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan, hal ini dimaksudkan untuk penguatan daerah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat bersaing secara global. Sehingga setiap daerah ini bisa meningkatkan dan memperkuat desa sesuai dengan bidangnya seperti dalam bidang sosial, budaya, politik, maupun juga dalam bidang perekonomian. Kemajuan ekonomi nasional juga dipengaruhi dari bantuan ekonomi pedesaan yang kuat sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

Pengembangan ekonomi di pedesaan sudah dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang dicita-citakan selama

ini. Salah satu faktor yang mendominasi adalah intervensi dari pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan pembangunan ekonomi pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian masyarakat desa.

Pendirian pengembangan kelembagaan berbasis ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat diharapkan mampu menjadikan stimulus dan menggerakkan perekonomian di pedesaan. Lembaga pengembangan ekonomi ini tidak lagi didirikan atau dasar intruksi dari pemerintah akan tetapi berawal dari adanya potensi yang ada, sehingga apabila dikelola dengan baik akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Strategi penguatan ekonomi desa ini bisa dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah dan untuk menggali potensi daerah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa serta tidak lagi didirikan atas intruksi pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, peran BUMDes ini di wujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di perdesaan dan juga pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa.² Tidak heran bahwa di seluruh desa di Indonesia memiliki Badan Usaha Milik Desa ini. BUMDes sendiri harus memiliki keunikan dan berbeda dengan lembaga ekonomi pada umumnya seperti badan usaha ini milik desa dan dikelola bersama, BUMDes ini operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal dan juga bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi yang dimiliki desa. Hal tersebut supaya eksistensi dan keberadaannya bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap peningkatan pendapatan desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan BUMDes yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes selanjutnya diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan yaitu menjadikan desa yang mandiri dan kesejahteraan melalui akselerasi perekonomian desa. Namun BUMDes ini keberadaannya belum banyak diketahui orang, dalam praktiknya tentu masih terdapat kendala yang dihadapi terkait dengan pengelolaan dan juga proses pengembangannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan tidak memberatkan masyarakat, karena BUMDes akan menjadi usaha Desa dalam menggerakkan perekonomian di Desa. Selain itu, BUMDes dituntut supaya bisa memberikan

² Rianto Nugroho dan Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa, Bagian 1: Konsep Dasar*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2021), hlm. 52

layanan kepada non-anggota (di luar masyarakat Desa) dengan memposisikan harga dan layanan yang berlaku sesuai dengan standar pasar.³

BUMDes sendiri juga memiliki peraturan perundang-undangan, yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Diharapkan dengan adanya peraturan ini bisa memberikan peluang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usaha kedepannya dan dengan berkembangnya BUMDes ini bisa memberikan dampak pada sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan juga kemandirian desa secara ekonomi. Dalam mewujudkan desa mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini mengubah paradigma tentang desa, dimana desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan diposisikan menjadi subjek sekaligus ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.⁴ Untuk mewujudkan tujuan desa dan juga kesejahteraan ekonomi masyarakat desa, pemerintah desa diharapkan untuk mampu mendirikan lembaga ekonomi desa, yaitu dengan mendirikan BUMDes yang sesuai dengan potensi desa masing-masing.

Perkembangan BUMDes di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, berdasarkan sumber data dari Kemendes, pada tahun 2022 telah tercatat sebanyak 47.094 BUMDes

³ Helmi Syamsuri, et.al, *Peningkatan Daya Saing Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMDes Tirta Mandiri*, dalam Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) 2018, hlm. 224-229

⁴ Icuik Rangga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), hlm. 7

dan 4.143 BUMDesma dengan total keseluruhan BUMDes secara Nasional adalah 51.237 BUMDes. Pada juli 2022 yang lalu, jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum mencapai 7.902.⁵ Perkembangan BUMDes pun juga terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1
Data klasifikasi BUMDes di Tulungagung Tahun 2022

Kecamatan	Maju	Berkembang	Pemula
Bandung	4	13	1
Besuki	6	2	2
Boyolangu	6	4	7
Campurdarat	3	4	2
Gondang	11	8	1
Kalidawir	12	5	-
Karangrejo	8	4	1
Kauman	11	1	1
Kedungwaru	8	8	3
Ngantru	7	5	1
Ngunut	15	3	-
Pagerwojo	6	2	3
Pakel	10	7	2
Pucanglaban	8	1	-
Rejotangan	8	8	-
Sendang	6	4	1
Sumbergepol	10	6	1
Tanggunggunung	6	-	1
Jumlah	145	85	27

Sumber : Data Desa Center DPMD Provinsi Jawa Timur, 2022⁶

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa perkembangan BUMDes di Kabupaten Tulungagung bisa dilihat berdasarkan klasifikasi yaitu BUMDes kategori maju, berkembang dan juga BUMDes pemula. Dengan adanya peningkatan jumlah BUMDes dari tahun ke tahun tersebut diharapkan mampu

⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Data BUMDesa dan BUMDesma Nasional*, dalam <https://bumdes.kemendes.go.id>, diakses pada 30 Desember 2022

⁶ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Provinsi Jawa Timur, *Data Desa Center: Data Klasifikasi BUMDes di Tulungagung 2022*, dalam <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>, diakses pada 05 Januari 2023

membawa manfaat bagi kemajuan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat desa.

Keuntungan positif adanya BUMDes ini adalah menciptakan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), membantu masyarakat miskin dan pembangunan pemanfaatan aset-aset desa, secara tidak langsung hadirnya dan hasil dari BUMDes ini menjadi model pemberdayaan ekonomi dan solusi pembangunan ekonomi desa. Persoalan model pemberdayaan ekonomi semestinya itu yang harus tergambarkan, mengingat kondisi dan potensi desa yang berbeda-beda, kadang ada model pemberdayaan ekonomi masyarakat secara modern dan ekonomi masyarakat secara tradisional perlu di bina secara profesional seluruh Indonesia.⁷

Penyelenggaraan BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat berfungsi memfasilitasi dan juga melindungi serta mensejahterakan ekonomi masyarakat pedesaan. BUMDes ini diharapkan menjadi jembatan yaitu peran pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat. Sehingga, keberadaan BUMDes sangat strategis, di mana sebagai lembaga milik ekonomi desa akan dapat memberikan peningkatan sumbangan bagi peningkatan sumber asli pendapatan desa (PADes), sehingga desa memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara mandiri tentunya yang berkontribusi.

⁷ Siti Rahayu dan Rury Febriana, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung", *Jurnal Trias Plolitika* Vol. 5 (1), 49-61, (Riau: Universitas Riau, 2021)), hlm.51

Dengan adanya BUMDes tersebut diharapkan mampu untuk membantu dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Dalam hal ini peneliti mengkaji terkait peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kendalbulur. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bernama BUMDes Larasati, yang mana BUMDes ini terletak di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. BUMDes Larasati ini sudah berdiri sejak tahun 2016 atas dasar hukum Perpes No. 3 tahun 2016 dan SK Kepala Desa Kendalbulur No.4 tahun 2016. Dalam pengoptimalan peran dan fungsi BUMDes Larasati, BUMDes ini bergerak di sektor usaha jasa simpan pinjam yang berdiri tahun 2016, unit usaha pertanian daun jeruk berdiri tahun 2019, unit usaha Pokdarwis Nakula Park yang berdiri pada awal tahun 2020, unit usaha minipadi yang berdiri tahun 2020 dan juga unit usaha kios online (PPOB) pada tahun 2021. Saat ini untuk perkembangan BUMDes melaksanakan kegiatan ekonomi melalui unit-unit usahanya dan mengembangkan BUMDes dengan memberdayakan sumber daya dan potensi desa.

Dari semua unit usaha yang sudah berjalan dan juga dalam proses perencanaan unit usaha kedepannya, unit usaha Pokdarwis Nangkula Park ini merupakan unit usaha yang berhasil menjadikan BUMDes Larasati ini bisa menduduki sebutan BUMDes Terbaik Jawa Timur pada tahun 2021, karena BUMDes Larasati ini dapat mempertahankan eksistensi unit usaha hingga sekarang ini dan juga meraih beberapa penghargaan BUMDes. Namun,

dibalik keberhasilannya ada masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan unit usahanya, yaitu kendala yang dihadapinya baik internal maupun eksternal.

Selain itu, disisi pelaksanaan peran dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat BUMDes Larasati dalam perjalanannya awalnya juga mengalami banyak kendala mulai dari masyarakat yang memandang sebelah mata BUMDes, gejolak dan opini negatif berkembang ditengah masyarakat, kurang pengetahuan terkait adanya BUMDes, sehingga masyarakat pesimis BUMDes ini bisa berkembang apalagi mampu untuk membuat perubahan dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu kendala yang dihadapi BUMDes Larasati ini adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat sulit menemukan orang-orang yang betul-betul mau berjuang untuk merintis dan mengelola BUMDes Larasati, kendala lainnya yaitu pemodaln yang dibutuhkan cukup besar serta adanya pesaing. Dengan adanya kendala-kendala yang terjadi tentunya BUMDes akan melakukan strategi untuk mengatasi kendala tersebut, seperti melakukan strategi dalam meyakinkan masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMDes, melakukan pendampingan BUMDes kepada anggota dan juga masyarakat, mengadakan suatu pelatihan, pengajuan proposal dan melakukan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat dan juga mengembangkan unit usaha BUMDes, dengan begitu BUMDes Larasati ini akan lebih mudah dalam menjalankan proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Pemberdayaan yang mendukung prinsip pemerataan, mampu menghasilkan pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat. Islam juga memandang suatu keberdayaan bagi masyarakat, yang mana merupakan suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam telah memiliki paradigma yang strategis dalam meningkatkan perekonomian di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, alasan peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di BUMDes Larasati karena ingin menggali lebih dalam lagi tentang pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui BUMDes, yang mana BUMDes sendiri merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang didirikan oleh pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan desa dan untuk mengangkat perekonomian desa. Selain itu BUMDes Larasati ini merupakan BUMDes yang berhasil dalam memberdayakan perekonomian masyarakat, dan mampu menempati BUMDes terbaik se-Jawa Timur. alasan selanjutnya yaitu dirasa relevan terkait dengan permasalahan perekonomian saat ini. Dari pemaparan diatas, peneliti mempunyai keinginan lebih untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di BUMDes Larasati Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka dapat di ajukan pertanyaan yang dijadikan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BUMDes Larasati dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kendalbulur Boyolangu Tulungagung?
2. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDes Larasati dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kendalbulur Boyolangu Tulungagung?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan BUMDes Larasati untuk menghadapi kendala dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Kendalbulur Boyolangu Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes Larasati dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kendalbulur Boyolangu Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi BUMDes Larasati dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kendalbulur Boyolangu Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dilakukan BUMDes Larasati untuk menghadapi kendala dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Kendalbulur Boyolangu Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan menambah ilmu pengetahuan juga menambah motivasi sebagai gambaran umum kepada pembaca terkait dengan topik penelitian yang akan di teliti khususnya terkait peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan bagi penelitian selanjutnya yang penelitiannya berkaitan dengan peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi dokumen akademik yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau acuan bagi aktivitas akademik mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Jurusan Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah.

b. Bagi BUMDes Larasati

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi atau pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya untuk BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan pada peneliti selanjutnya dengan tema yang sejenis, sehingga dapat memaksimalkan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini menggunakan dan menganalisa lebih lanjut mengenai:

1. Secara Konseptual

- a. Peran, menurut Riyandi peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.⁸
- b. BUMDes menurut Maryunani merupakan lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kedekatan sosial

⁸ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong, dan Joorie Meruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJM Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 04 (48), 1-9, (t.t.p: t.p, 2022), hlm. 2

masyarakat yang dibentuk dan didasarkan dari kebutuhan dan potensi desa.⁹

- c. Pemberdayaan menurut Ambar Teguh bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.¹⁰
- d. Ekonomi menurut Henry Faisal bahwa ekonomi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka ekonomi merupakan kegiatan taraf hidup untuk mencapai kebutuhan hidup secara materi.¹¹

2. Secara Operasional

Secara operasional dari penelitian ini dimaksudkan yaitu mengkaji lebih mendalam mengenai peran BUMDes Larasati Desa Kendalbulur untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa, kendala apa saja yang dihadapi BUMDes Larasati dalam meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta menemukan strategi yang digunakan BUMDes Larasati untuk mengatasi kendala tersebut.

⁹ I Putu Agus Adnyana dan Oka Suryadinatha Gorda, *Strategi Manajemen SDM Demi Tigawasa Yang Lebih Baik*, (Bali: Nilacakra, 2020), hlm. 15

¹⁰ Pantri Heriyati, Taufani, dan Kurniatun, *Pemberdayaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sebagai Pengembangan Potensi Usaha Kecil Warga*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 147

¹¹ Henry Faisal, *Ekonomi Media*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 2

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan, oleh karena itu berikut sistematika skripsi yang terdiri dari tiga bagian utama adalah:

Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Utama

BAB 1 Pendahuluan, pada bab ini memuat tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini mengkaji tentang paparan data dan temuan penelitian, yang sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data dari penelitian pada objek yang telah diamati dan informasi yang bisa digali.

BAB V Pembahasan, bab ini merupakan bahasan dari temuan atau hasil penelitian dengan mengacu pada teori-teori yang didapat pada teori-teori yang didapat ketika observasi berlangsung.

BAB VI Penutup, bab ini merupakan kesimpulan akhir dari skripsi yang dilengkapi saran. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.